

# PENGUMUMAN DAFTAR ANTREAN

## LOKET PELAYANAN PENGADILAN PAJAK TANGGAL 23 MARET 2021

### Hal - hal yang perlu diperhatikan:

1. Tidak disediakan lahan parkir untuk pengunjung, lahan digunakan untuk ruang tunggu tambahan.
2. Kendaraan dapat *drop off* penumpang di area yang ditentukan.
3. Petugas Satuan Pengamanan akan memberikan nomor urut sesuai waktu kedatangan pemohon.
4. Tunjukkan kartu identitas kepada petugas Satuan Pengamanan.
5. Tunjukkan bukti terdaftar di daftar antrean (dapat berupa tangkapan layar pengumuman ini).
6. Bagi pendaftar yang tidak mendapatkan kuota antrean *online* dan tidak mendapat konfirmasi balasan, dimohon untuk mengirimkan e-mail pertanyaan melalui alamat e-mail berikut ini: [informasipp@kemenkeu.go.id](mailto:informasipp@kemenkeu.go.id)
7. Untuk ketentuan lain dapat dilihat di Surat Edaran Sekretaris Pengadilan Pajak Nomor SE-01/SP/2020.
8. Pendaftar wajib mengikuti Jam Kedatangan sesuai dengan yang dituliskan pada pengumuman ini.
9. Sesuai SE-01/PP/2021, pengajuan banding/gugatan dan penyampaian dokumen persidangan dan surat-surat lainnya kecuali permohonan Peninjauan Kembali, diimbau untuk dilakukan melalui pos/ekspedisi tercatat.

### LOKET A (PENGAJUAN BANDING/GUGATAN)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	PT Indo Sawit Kekal	Selasa, 23 Maret 2021	A	10.00 - 11.00 WIB
2	PT Indosat Tbk	Selasa, 23 Maret 2021	A	10.00 - 11.00 WIB
3	PT Volkopi Indonesia	Selasa, 23 Maret 2021	A	10.00 - 11.00 WIB
4	PT. Singa Terbang Dunia	Selasa, 23 Maret 2021	A	10.00 - 11.00 WIB

### LOKET B (PERMOHONAN IKH/SKSP)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	PT Inti Prima Rasa	Selasa, 23 Maret 2021	B	10.00 - 11.00 WIB
2	Baron Samudra K	Selasa, 23 Maret 2021	B	10.00 - 11.00 WIB

### LOKET C (PENINJAUAN KEMBALI DAN KONTRA MEMORI PK)

No.	Nama	Hari & Tanggal	Loket	Waktu
1	PT Clama Indonesia	Selasa, 23 Maret 2021	C	10.00 - 12.00 WIB
2	PT Kapuas Rimba Sejahtera	Selasa, 23 Maret 2021	C	10.00 - 12.00 WIB
3	PT Toyo Seal Indonesia	Selasa, 23 Maret 2021	C	10.00 - 12.00 WIB

### Penting:

Sehubungan dengan instruksi dari Pemerintah Pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pengadilan Pajak berkomitmen untuk menetapkan pembatasan pelaksanaan layanan administrasi secara tatap muka.